

Peran Pemerintah Desa Dalam Eksistensi Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo

Putri Amaliatul Azizah¹, Ilmi Usrotin Choiriyah^{2*}

^{1,2} Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

*Email korespondensi: ilmiusrotin@umsida.ac.id

Abstrack: Villages have a big role in providing services to realize a prosperous community life. Pujihartono defines GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) as a group consisting of farmer fathers whose scope is from the same village. In this study took the location of Kedung Banteng Village, Tanggulangin Subdistrict, Sidoarjo Regency with the consideration that Kedung Banteng Village, although the majority of the population earns a living as a fishery and there are also farmers. The problems that occur in Kedung Banteng Village are related to the problem of settling waters and land subsidence which makes it difficult for them to plant seeds. This research uses qualitative methods. The method has the final result in the form of descriptive data in the form of oral and written information from a person and the results of observing behavior. The technique used is purposive sampling or using consideration as a technique for determining sources as research samples. The results of research with Gapoktan members show that the Kedung Banteng village government must provide concrete evidence regarding the problems faced by the community. The importance of the Agriculture Office issuing local regulations governing the empowerment of farming communities remembers the government in order to encourage food security and the welfare of farmers.

Keywords: Role, Village government, Farmer Group Association

Abstrak: Desa mempunyai peran yang besar untuk menyediakan pelayanan demi mewujudkan hidup masyarakat yang sejahtera. Dalam penelitian ini mengambil lokasi Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Desa Kedung Banteng meskipun mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai perikanan dan ada juga sebagai petani. Permasalahan yang terjadi di Desa Kedung Banteng yaitu terkait permasalahan perairan yang mengendap dan penurunan tanah yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan penanaman bibit. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut memiliki hasil akhir berupa data secara deskripsi dalam bentuk informasi lisan serta tertulis dari seseorang serta hasil pengamatan perilaku. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling atau menggunakan pertimbangan sebagai teknik penentu narasumber sebagai sampel penelitian. Hasil penelitian dengan Anggota Gapoktan menunjukkan bahwasanya Pemerintah desa Kedung Banteng harus memberikan bukti nyata terkait permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Pentingnya Dinas Pertanian mengeluarkan peraturan daerah yang mengatur tentang pemberdayaan masyarakat petani mengingat pemerintah agar mendorong ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Hasil dan pembahasan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa upaya dalam memberdayakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani telah dilakukan oleh pemerintah desa dengan dibuktikan dari pengadaan sarana dan prasarana, fasilitas, serta berbagai pelayanan yang menjadi penunjang petani di Desa Kedung Banteng. Peran dari pemerintah desa tersebut telah terlaksana dengan baik dengan masih dapat lebih dimaksimalkan kembali. Apabila merujuk dari UU No.6 Th. 2014 mengenai Desa serta PP No. 19 Th. 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Kata kunci: Peran, Pemerintah Desa, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

PENDAHULUAN

Di Indonesia, Sebagian masyarakatnya merupakan bagian dari masyarakat agraris sehingga perannya memiliki kontribusi yang besar untuk Pembangunan Nasional terutama dalam sektor pertanian, hal ini dibuktikan dengan pendapatan yang didapatkan oleh mereka sebagian besar hasil dari produk pertanian contohnya perkebunan, tanaman pangan, perikanan, peternakan, serta kehutanan (Wijaya et al., 2022). Namun, pada realitanya yang membangun bidang pertanian di Indonesia sebagian besar merupakan petani yang memiliki skala usaha relatif kecil (Ahmar et al.,

2016). Oleh karena itu, perlu adanya peran pemerintah serta pendirian kelompok GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) yang berperan melihat tingkat keadaan pertanian di Indonesia.

Desa mempunyai peran yang besar untuk menyediakan pelayanan demi mewujudkan hidup masyarakat yang Sejahtera. Hal ini disebabkan kewenangan secara umum dari pemerintah desa yaitu dapat mengatur kehidupan masyarakat secara strategis atau telah terikat aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan termuat dalam UU No. 6 Th. 2014 mengenai Desa. Soejono Soekanto (2012:212) berpendapat, bahwa aspek dinamis kedudukan (status) adalah peran, jika kewajiban dan hak seseorang dilaksanakan sesuai kedudukannya, hal tersebut sama dengan melakukan perannya. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan definisi peran yaitu individu yang memiliki kedudukan serta melakukan hak dan kewajibannya.

Pujiharto mendefinisikan GAPOKTAN (Gabungan Kelompok Tani) sebagai kelompok yang beranggotakan bapak tani yang ruang lingkupnya dari desa yang sama. Kelompok tani terbentuk dari hasil surat keputusan serta memiliki visi menjadi ruang para petani untuk berkomunikasi. Kemudian kelompok” ini digabung menjadi GAPOKTAN sesuai PERMENTAN No. 273/Kpts/OT.160/4/2007 memiliki tujuan untuk secara kooperatif, menggalang kepentingan bersama supaya kelompok ini daya memiliki daya serta berhasil guna (Universitas Udayana, 2018).

Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo dengan pertimbangan bahwa Desa Kedung Banteng meskipun mayoritas penduduknya bermata pecaharian sebagai perikanan dan ada juga yang bermata pencaharian sebagai petani (Safitri, 2015). Desa Kedung Banteng memiliki komunitas kelompok tani sebanyak 2 kelompok yang tergabung kedalam Gabungan Kelompok Tani di tingkat desa dengan nama Gapoktan “Sri Rejeki”. Gapoktan Sri Rejeki terbagi menjadi 2 kelompok yaitu Gapoktan Sri Rejeki 1 dan 2. Gapoktan Sri Rejeki 1 terdiri dari blok jambe, kulon omah dan wetan omah. Sedangkan gapoktan Sri Rejeki 2 terdiri dari blok sepat, blok balong kebo dan blok terus. Sayangnya dari kedua nama komunitas tersebut hanya tinggal beberapa blok saja yang sampe sekarang masih beroperasi. Hal itu terjadi karena banyaknya masyarakat yang memilih beralih di sector perikanan dan pesawahan diubah menjadi tambak.

Tabel 1: Rekapitulasi Luas tanah sawah serta Jumlah Anggota Kelompok Tani di Desa Kedung Banteng

Nama Gabungan Kelompok	Jumlah Anggota	Luas Sawah
Poktan Blok Sepat	13 Orang	25 Ha
Poktan Balong Kebo	8 Orang	10 Ha
Poktan Blok Terus	11 Orang	15 Ha

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan tabel di atas luas sawah di Desa Kedung Banteng sekitar 99.415 Ha. Akan tetapi tidak sepenuhnya luas sawah 99.415 digunakan untuk penanaman dikarenakan sudah ada tanah sawah yang dijadikan tambak. Para Gapoktan di desa Kedung Banteng hanya menjadi 3 tempat sawah yaitu Poktan Blok Sepat, Poktan Blok Balongkebo dan Poktan Blok Terus dengan keseluruhan menjadi 32 anggota kelompok tani.

Dalam sektor pertanian desa Kedung Banteng juga memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan desa desa lainya yang berada di Kecamatan Tanggulangin. Perbedaan tersebut bisa diketahui dari beberapa kali untuk melakukan penanaman bibit. Desa Kedung Banteng sendiri hanya bisa melakukan penanaman 1 tahun sekali pada saat musim kemarau saja jika disaat musim hujan

mereka sangat kesulitan untuk melakukan penanaman dan untuk desa lainya mereka bisa melakukan penanaman 2-3 kali hal itu yang sampe saat ini menjadi pembeda antara penanaman bibit didesa kedung Banteng dan desa desa yang lain. Permasalahan yang terjadi didesa Kedung Banteng yaitu terkait permasalahan perairan yang mengendap dan penurunan tanah yang membuat mereka kesulitan untuk melakukan penanaman bibit. Masyarakat beranggapan bahwa penurunan tanah ini disebabkan adanya pengeboran gas yang terjadi didesa Kedung Banteng. Akan tetapi hal tersebut tidak bisa dijadikan kebenaran dikarenakan sampai saat ini belum ada pembuktian secara signifikan akibat terjadinya penurunan tanah didesa Kedung Banteng. Penurunan tanah ini juga memiliki pengaruh terhadap perairan didesa Kedung Banteng dikarenakan saat petani melakukan penanaman bibit perairan yang mengendap dan tidak ada celah mengakibatkan tanah yang sudah mulai ditabur benih sangat sulit untuk mengembangkan bibitnya dan para petani terus mengalami kegagalan dan belum pernah sama sekali ada yang berhasil hingga saat ini.

Dalam mewujudkan permasalahan penanaman bibit didesa Kedung Banteng antara pemerintah desa dan masyarakat memiliki konflik yang dimana waktu peneliti melakukan penelitian terjadi perbedaan pendapat antara masyarakat dan juga pemerintah desa. Pemerintah desa beranggapan bahwa mereka sudah melakukan strategi untuk mengatasi permasalahan terkait sektor pertanian. Strategi yang dilakukan yaitu dengan melakukan sosialisasi setiap ingin melakukan penanaman bibit serta selalu mengunjungi sawah sawah yang ada didesa Kedung Banteng. Pemerintah desa beranggapan bahwa para petani didesa Kedung Banteng mereka memiliki rasa kebersamaan yang kurang jika dibandingkan dari sektor pertanian didesa yang lainya. Peneliti juga sempat berkunjung ke sawah untuk berbicara langsung dengan para petani. Terkait tanggapan dari pemerintah desa hal itu ditolak keras oleh para petani didesa Kedung Banteng dikarenakan strategi para pemerintah yang selama ini mereka asumsikan kepada public itu tidak sepenuhnya terbukti. Tindakan terkait hal tersebut sama sekali tidak ada pembuktian hingga sampai saat ini. Para petani beranggapan bahwa pemerintah desa hanya mengusahakan saja tetapi tiada bukti nyata.

Adapun hal yang membuat para petani mengalami keresahan, mereka harus membayar pajak dengan tepat waktu tetapi mereka juga sangat lelah karena terus mengalami kerugian. Para petani juga sempat didatangi oleh pegawai dari Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo para pegawai memberikan pendapat kepada para petani bahwa harusnya mereka sudah ada pembagian bibit benih gratis tetapi jika mereka mengambil di balai desa mereka dikenakan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Peneliti juga tidak membenarkan asumsi dari satu pihak saja jika dilihat dari bukti nyata para pemerintah desa sudah memberikan bantuan mesin tetapi mereka hanya memberikan alatnya saja tidak dengan bahan bakar untuk menghidupkan mesinnya. Atas permasalahan dan kurangnya pembuktian serta kurangnya komunikasi baik dari pemerintah desa dengan para petani maka dari itu dibutuhkan adanya peran pemerintah dikarenakan sampai saat ini para petani beranggapan bahwa kita para Gapoktan yang mandiri tanpa memberitahu keluhan apa saja yang sudah dirasakan karena mereka telah beranggapan bahwa semua yang mereka keluhkan menjadi sia sia (Prasetyo, 2021).

Peran Pemerintah dalam pelaksanaan pemberdayaan petani yang telah tersalurkan di masyarakat masih mengalami permasalahan yang begitu kompleks di lapangan. Hal ini dapat dilihat bahwa harapan dan kenyataan jauh berbanding terbalik apa yang diharapkan petani dengan bantuan yang diberikan pemerintah (Maknun, 2021). Peran pemerintah daerah dalam pemberdayaan Gapoktan di desa Kedung Banteng kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidorarjo belum berjalan dengan baik (Azis, M.V.N.A. et al., 2022). Sehingga pada tahun 2021 pemerintah desa melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Beberapa upaya pemerintah untuk

melakukan upaya seperti penanaman bibit dengan melalui program pelatihan pembuatan pupuk. Program pelatihan pembuatan pupuk berjalan setiap 2 tahun sekali. Pemerintah desa berperan penting dalam menciptakan program ini dikarenakan adanya Pencemaran dan kerusakan lahan pertanian makin meningkat sejalan dengan penggunaan dosis tinggi pupuk kimia oleh para petani.

Adapun penelitian terdahulu yang telah digunakan oleh peneliti lainnya untuk digunakan sebagai acuan dalam mengkaji penelitian saat ini diantaranya penelitian oleh Abdul Malik tahun 2020 tentang “Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Rukun Santoso Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Desa Kajarharjo”

Pertama, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian sejarah dengan melalui beberapa tahapan pemilihan topik, heuristic, kritik sumber (intern dan extern), interpretasi dan historiografi. Kesimpulan yang diambil yaitu untuk meningkatkan kualitas para petani mereka telah melakukan berbagai cara dengan mengadakan penyuluhan dengan harapan adanya penyuluhan tersebut dapat meningkatkan kualitas hasil panen para petani. Hal yang membedakan dengan penelitian saat ini yaitu peran yang dimiliki oleh para Gapoktan sedangkan penelitian saat ini membahas mengenai kebersamaan kinerja Gapoktan dengan Pemerintah Desa yang berada di Kedung Banteng.

Selanjutnya, yaitu data peneliti oleh Anggreyni Raintun, Sarah Sambiran, Ismail Sumampow yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” pada tahun 2021 (Andri et al., 2023). Penelitian terdahulu dalam hal ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah Data Primer yang meliputi Observasi, Wawancara kemudian data sekunder yakni Studi Pustaka. Peneliti terdahulu dengan saat ini sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif (Nurjanah, 2019). Perbedaan antara peneliti terdahulu dengan saat ini dilihat dari Teknik penentuan informan dimana peneliti terdahulu melakukan wawancara Bersama Ketua Gapoktan dan PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan) sedangkan peneliti saat ini hanya wawancara Bersama Pemerintah desa dan kelompok tani.

Terakhir, data peneliti oleh Muhammad Viki Nisfani Al Azis yang berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani Di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” pada tahun 2022. Penelitian Terdahulu dengan saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif untuk menggambarkan penelitian Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi. Perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada data yang didapatkan. Peneliti terdahulu mencantumkan data yang kurang karena disana tidak mencantumkan dokumentasi hanya penilaian terhadap beberapa indikator saja sedangkan peneliti saat ini beberapa indikator memiliki data tersendiri (Azis, 2022).

Untuk menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan petani di desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo peneliti telah menggunakan teori peran yang dikemukakan Menurut Arif dalam Adhawati (2012:9) Peran pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat yaitu terbagi menjadi 4 indikator peran yaitu: Peran pemerintah sebagai Regulator, Peran pemerintah sebagai Dinamisator, Peran pemerintah sebagai Fasilitator, Peran pemerintah sebagai Katalisator (Diah et al., 2022). Adanya peran pemerintah merupakan hal yang wajib diterapkan baik dari segi fisik maupun materi. Untuk menanggapi permasalahan gapoktan di desa Kedung Banteng peran pemerintah desa selalu memberikan arahan dan support meskipun

sering mengalami kegagalan harus tetap melakukan penanaman agar tidak sempat dibiarkan begitu saja.

Tabel 1: Jenis Bantuan Program Pembuatan Pupuk

No	Jenis Bantuan	Tahun	Jumlah
1	Mesin Traktor	2013	1 Buah
2	Pompa Air Irigasi	2016	3 Buah
3	Bantuan Bibit	2021	1500 Kg

Sumber: Diolah oleh Penulis

Berdasarkan deskripsi di atas bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Kabupaten Sidoarjo sudah dimanfaatkan dengan baik Bantuan mesin tractor digunakan secara bergantian oleh para anggota kelompok tani dalam tempat lahan sawah yang berbeda (Waddin, 2015). Bantuan yang diberikan pemerintah desa belum bisa dimanfaatkan oleh para kelompok tani didesa Kedung Banteng dikarenakan kurang tepat sasaran dan tidak sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan oleh para Gapoktan (Firdaus, 2020). Atas hal tersebut Peran Pemerintah Desa dalam Eksistensi Gapoktan dinilai masih kurang baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk memilih tempat penelitian di Desa Kedungbanteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo untuk mengetahui sejauh mana peran pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan Gapoktan di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. Sehingga penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Peran Pemerintah Desa Dalam Eksistensi Gapoktan Di Desa Kedung Banteng Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut memiliki hasil akhir berupa data secara deskripsi dalam bentuk informasi lisan serta tertulis dari seseorang serta hasil pengamatan perilaku (Sugiyono, 2007:15). Pada penelitian ini fokusnya adalah terkait dengan “ Peran Pemerintah Dalam Eksistensi Gapoktan”. Penelitian dilakukan di Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Tanggulangin, tepatnya di Desa Kedung Banteng. Teknik yang digunakan yaitu *purposive sampling* atau menggunakan pertimbangan sebagai teknik penentu narasumber sebagai sampel penelitian. Narasumber pada penelitian ini yaitu dua perwakilan Pemerintah Desa serta satu perwakilan Anggota Gapoktan dan Agen kios pupuk. Dalam hal mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara yang kemudian menjadi sumber data primer, serta dokumentasi. Sumber data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder yang digunakan merupakan hasil dari studi kepustakaan daei dokumen-dokumen, artikel ilmiah, buku, dan berita yang berasal dari media massa yang disesuaikan dengan topik yang diteliti. Selain itu, dalam penelitian ini digunakan teori 4 indikator yang telah disampaikan oleh Arif yang dikutip dari Adhawati (2012:9) adalah yang Pemerintahn memiliki peran sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, serta katalisator. Untuk menganalisis data atau mengelola data penelitian digunakan Teknik kualitatif dengan model interaktif yang telah dijelaskan pada Miles & Huberman (1994), yang terdiri dari data dikumpulkan, kemudian direduksi, yang kemudian data disajikan, hingga kemudian dicapai hasil kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka melakukan kajian lebih mendalam terkait dengan pemerintah desa dalam menjalankan peran untuk memberdayakan masyarakat yang berprpfesi sebagai petani di Desa Kedung Banteng, Kecamatan Tanggulangin, maka dengan mengaplikasikan teori Peran Pemerintah

penulis menggunakan 4 indikator disampaikan oleh Arif pada Adhawati (2019:9), bahwa pemerintah berperan menjadi Dinamisator, Regulator, Katalisator, serta Fasilitator.

Peran Pemerintah Desa sebagai Regulator

Dalam berperan menjadi Regulator, pemerintah memiliki kewajiban dalam mengatur persiapan serta keseimbangan pembangunan dengan mengarahkan sehingga dapat terselenggara dan diterbitkan peraturan-peraturan. Rujukan yang digunakan oleh Desa Kedung Banteng dalam memberdayakan masyarakat profesi petani yaitu peraturan yang sifatnya umum yaitu UU No. 6 Th. 2014 mengenai Desa dan UU No 19 Th.2013 tepatnya pada pasal 19 ayat 4 menjelaskan terkait kewenangan dari pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan pembinaan kepada GAPOKTAN, petani dan kelompok tani untuk mewujudkan sarana produksi pertanian yang memberikan hasil berkualitas. Pemerintah desa telah melakukan Musyawarah Perencanaan Penetapan penanaman bibit dan memunculkan program pelatihan pembuatan pupuk untuk merencanakan pemberdayaan dengan tujuan memajukan pola pikir petani. Jika dilihat dari peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap masyarakat petani di Desa Kedung Banteng mengungkapkan bahwasanya pemerintah hanya sebatas memberikan intruksi saja yang nyatanya itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi keluhan yang dirasakan para Gapoktan.

Hasil wawancara peneliti dengan Anggota Gapoktan menunjukan bahwasanya Pemerintah desa Kedung Banteng harus memberikan bukti nyata dalam mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Pentingnya Dinas Pertanian dalam memberikan kebijakan pada peraturan daerah terkait pemberdayaan masyarakat petani dengan harapan supaya dapat menjadi dorongan untuk pemerintah terkait kesejahteraan petani serta ketahanan pangan. Peranan ini apabila dikaitkan dengan Peneliti Terdahulu dari Anggraenyi Rentung, dkk (2021) berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” juga menerapkan bentuk peranan Regulator akan tetapi pada peneliti sebelumnya untuk tingkat pemberdayaan mereka menciptakan program serta pelatihan melalui anggota PPL sedangkan peneliti saat ini yang menciptakan program serta pelatihan dari pemerintah desa sendiri.

Peran Pemerintah Desa sebagai Dinamisator

Peran dalam menjadi dinamisator pada pemerintah dapat dilaksanakan dengan modal memiliki kompetensi untuk menyediakan pengarah, bimbingan, sertam kemampuan dalam menarik masyarakat untuk bergabung supaya dapat melahirkan masyarakat yang peduli, serta memberikan partisipasi secara aktif pada setiap pembangunan. Adanya pengarah serta pembinaan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam memberdayakan masyarakat profesi petani (Andriani, 2023).



Gambar 1. Penetapan penanaman bibit bersama para anggota Gapoktan

Sumber: Diolah Penulis 2023

Data kejelasan di atas dibuktikan bahwa pemerintah desa Kedung Banteng dalam melaksanakan pemberdayaan mengundang para anggota Gapoktan untuk memberikan pembinaan yang bertujuan meningkatkan kualitas petani melalui sosialisasi. Akan tetapi, Saat ini pemerintah desa hanya fokus terhadap kendala yang dirasakan oleh para petani seperti penanaman bibit yang selalu mengalami gagal panen dan juga jarang sekali menyelenggarakan program pelatihan. Pemerintah desa hanya memberikan penyampaian saja dan pemerintah juga jarang menciptakan sebuah program pelatihan. Padahal para anggota gapoktan dengan umur yang sudah cukup tua membutuhkan banyak pelatihan serta bimbingan.

Peranan sebagai dinamisator masih belum maksimal dikarenakan kurangnya pengarahan/bimbingan. Pemerintah juga telah mengajukan bantuan kepada Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan, namun bantuan yang diberikan belum menyesuaikan harapan serta kebutuhan petani yaitu terkait dengan pemberian bantuan bibit pendek karena tidak dapat menyesuaikan kondisi tanah lahan yang ada di desa Kedung Banteng. Akibat hal tersebut, partisipasi anggota kelompok tani menjadi sangat rendah pada kegiatan pelatihan dan penyuluhan (Raintung et al., 2021). Penelitian ini menunjukan hasil yang sama dengan penelitian terdahulu menurut Anggraeny Raintung, dkk (2021) berjudul “Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow” dengan indikator yang sama juga mengalami permasalahan terkait kurangnya bimbingan atau pengarahan pada kelompok tani terkait dengan tingkat keaktifan dalam memberikan bimbingan atau pengarahan dari pemerintah yang membuat para anggota petani merasa kesulitan dalam mengatasi permasalahan yang dialami.

Peran fasilitator bagi pemerintah terkait dengan terciptanya situasi Pembangunan (menjadi jembatan dalam kepentingan pihak-pihak untuk Pembangunan daerah yang optimal) supaya terlaksana secara kondusif. Dalam hal ini pemerintah perlu mengusahakan dalam terciptanya atau memberikan fasilitas kondisi yang aman, nyaman, serta tertib termasuk juga terfasilitasi dalam hal sarana dan prasarana pembangunan seperti permodalan/pendanaan serta pembinaan.



Gambar 3 dan 4: Bantuan Dinas Pertanian, Perkebunan Dan Peternakan Sidoarjo
Sumber: Data peneliti 2023

Berdasarkan gambar di atas pemerintah desa telah memberikan bantuan berupa Mesin Traktor dan juga Pompa air irigasi. Terkait fasilitas pemerintah desa kedung Banteng sudah responsif dimana pemerintah desa sudah melakukan apa yang sesuai dengan kebutuhan para petani. Akan tetapi kurang responsive terkait dengan permodalan dikarenakan keterbatasan anggaran dan kurangnya perhatian dari Kepala Desa. Mereka hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah daerah saja. Berdasarkan pendapat penulis, peran sebagai fasilitator pada pemerintah desa Kedung Banteng dengan permodalan dapat dikategorikan kurang maksimal. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah desa berupaya membuat pengajuan perencanaan yang dianggarkan di APBdes sesuai dengan kebutuhan para anggota Gapoktan. Dalam Penelitian Terdahulu dari Muhammad Viki Nisfani Al Azis (2022) berjudul “ Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” mengenai fasilitas dan kurangnya perhatian dari Kepala Desa. Penelitian sebelumnya menggunakan indikator yang sama. Dalam mewujudkan peranan sebagai Fasilitator sudah dikatakan cukup baik. . Hal tersebut dibuktikan dengan bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran meskipun tidak sepenuhnya dikatakan maksimal. Terkait dengan pembeda dengan yaitu peran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan para anggota tani. Peneliti terdahulu melakukan rapat setiap seminggu sekali guna untuk membahas fasilitas yang dibutuhkan petani.

Peran Pemerintah sebagai Katalisator

Sebagai katalisator, pemerintah berperan menjadi tokoh utama dalam hal percepatan berkembangnya potensi suatu daerah serta negara sehingga tercipta pembangunan partisipasi melalui modal sosial tersebut. Selain itu peran lainnya adalah sebagai pendorong untuk adanya kerja sama serta koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat. Pemerintah desa sudah melakukan kerja sama terkait dengan subsidi pupuk dengan kios yang bertempat di Kedung Banteng menurut peneliti bentuk kerja sama antara keduanya paling tepat dikarenakan para anggota gapoktan pasti membutuhkan pupuk untuk bibit padi yang sudah ditanam agar tanaman padi semakin meningkat. Akar tanaman dan tanah yang diberi pupuk memiliki kadar unsur hara yang meningkat serta menjadi media tanam yang dapat menumbuhkan tanaman menjadi lebih subur. Selain berkaitan dengan kesuburan, fungsi pupuk juga sebagai anti hama yang menyerang tanaman (Khosiah & Kurniawati, 2019).



Gambar 5, 6, 7: Kerja sama dengan pemilik Kios pupuk
Sumber: Data peneliti 2023

Dari data di atas menjelaskan bahwa peneliti sudah mengunjungi tempat penjual kios pupuk yang dimana pada saat melakukan wawancara peneliti mendapatkan informasi terkait dengan kerja sama yang dilakukan oleh para anggota Gapoktan dengan penjual Kios pupuk. Peneliti menyampaikan terkait dengan kerja sama antara keduanya sudah maksimal dikarenakan Upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan pemilik kios pupuk sudah berjalan hingga bertahun – tahun. Terkait dengan peran pemerintah sebagai katalisator sudah patut untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan yang dialami pemerintah desa terhadap anggota Gapoktan didesa Kedung Banteng. Peneliti Tedahulu dari Muhammad Viki Nisfani Al Azis (2022) berjudul ” Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Petani di Desa Kertamukti Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi” dan memiliki kesamaan indikator dalam pelaksanaannya. Letak kerja sama yang dilakukan menjadi faktor dominan yang menjadi perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Data empiris terkait kerja sama dalam peneliti terdahulu tidak dicantumkan.

KESIMPULAN

Dilihat dari hasil dan pembahasan yang didapatkan setelah dilakukan penelitian, maka dapat disimpulkan terkait peran dari pemerintah desa tersebut telah terlaksana dengan baik dengan masih dapat lebih dimaksimalkan kembali. Apabila merujuk dari UU No.6 Th. 2014 mengenai Desa serta PP No. 19 Th. 2013 mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani, peran sebagai regulator belum terlaksana dengan maksimal hal ini disebabkan terdapat banyak anggota GAPOKTAN yang mengeluh serta merasa pemerintah desa belum memberikan banyak bukti nyata. Peran sebagai dinamisator sudah cukup optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan pemerintah yang berupaya mengajukan anggaran kepada dinas serta memfasilitasi masyarakat yang berprofesi sebagai petani melalui adanya pembinaan. Selain itu, telah diadakan penyediaan bibit tanaman serta pelatihan dalam membuat pupuk. Akan tetapi, sebagai fasilitator, peran pemerintah masih belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan terkait dengan bantuan modal yang berhubungan dengan

bahan bakar mesin yang digunakan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pemerintah masih kurang perhatian, walaupun telah menyediakan sarana prasarana penunjang lainnya dan juga traktor. Sebagai katalisator, pemerintah sudah berperan dengan maksimal dikarenakan upaya yang dilakukan pemerintah desa dengan pemilik kios pupuk sudah berjalan hingga bertahun – tahun. Terkait dengan peran pemerintah sebagai katalisator sudah patut untuk mengatasi permasalahan pemberdayaan yang dialami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmar, Mappamiring, & Parawangi, A. (2016). PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN PETANI PADI DI DESA PARUMPANAI KECAMATAN WASUPONDA KABUPATEN LUWU TIMUR. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2).
- Andri, M., Rafie, M., Budiman, H., & Huda, A. I. (2023). The Role of Village Government In Overcoming Environmental Pollution Caused by Tofu Factory Waste. *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 38–48. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v10i1.7079>
- Andriani, M. O. (2023). *PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM (CBT) (Studi di Wisata Alam Taman Jaya Lestari Desa Cabang Lampung Tengah)*. Universitas Lampung.
- Azis, M. V. N. A. (2022). PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, VII(01).
- Diah, M., Nazaki, & Winarti, N. (2022). PERAN PEMERINTAH KOTA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONFLIK TAXI ONLINE DAN TAXI KONVENSIIONAL DI KOTA BATAM. *Universitas Maritim Raja Ali Student Online Journal*, 3(1).
- Firdaus, R. (2020). PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI REGULATOR, DINAMISATOR, FASILITATOR, DAN KATALISATOR DALAM PEMBERDAYAAN PETANI KAKAO DI KABUPATEN LUWU UTARA. *Jurnal I La Galigo | Public Administration Journal*, 3(1).
- Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa Akreditasi Jurnal Nasional Sinta, J., Muhammad Viki Nisfani Al Azis, A., Studi Ilmu Pemerintahan, P., Singaperbangsa Karawang Jalan Ronggowaluyo Telukjambe Timur, U. H., Karawang, K., & Viki Nisfani Al Azis Universitas Singaperbangsa Karawang, M. (2022). *PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DI DESA KERTAMUKTI KECAMATAN CIBITUNG KABUPATEN BEKASI*. 01.
- Khosiah, & Kurniawati, R. (2019). Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Limbah Pasar Di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *JISIP*, 3(1).
- Maknun, L. (2021). *PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YAH*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Muhammad Ramajaya*, D. R. T. K., Program, M., Organik, K., Kasus, S., Kampung, D., Sutan, N., Mojosongo, K., Jebres, K., Surakarta, K., Ramajaya, M., Retnowati, D., & Kismantoroadji, T. (2021). Community Development Through Organic Vegetable Village Program (Case Study In Ngemplak Sutan Sub Village, Mojosongo Village, Jebres District, Surakarta City). *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 22(1), 75–87.

- Nurjanah, S. (2019). *ANALISIS MENGELOLA BRAND IMAGE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Pada G Hotel Syariah dan Hotel Nusantara Syariah Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan.
- Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Mobuya Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Governance*, 1(2).
- Safitri, A. (2015). IMPLEMENTASI PROGRAM GAPOKTAN (PENDIDIKAN NON FORMAL) DALAM MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PETANI DI DESA NGADISANAN KECAMATAN SAMBIT KABUPATEN PONOROGO Info Artikel. *Edu Geography*, 3(8). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edugeo>
- Sukeji*, B. W. D. R. (2022). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat (Studi Kasus Dusun Dukuh Desa Donokerto Kecamatan Turi Kabupaten Sleman) Role of Village Community Empowerment Institutions in Empowering the Community (Case Study of Dusun Dukuh, Donokerto Village Turi District, Sleman Regency). *Jurnal Dinamika Sosial Ekonomi*, 23, 204–218.
- Universitas Udayana. (2018). SEMINAR NASIONAL PENGEMBANGAN AGRIBISNIS 2018. *Farmpreneurship: Solusi Menumbuhkan Generasi Petani Milenial Dan Menyejahterakan Keluarga Petani*.
- Waddin, A. K. (2015). *FINAL PROJECT-RE 141581 ORGANIC SOLID WASTE MANAGEMENT OF SLAUGHTERHOUSES, TOFU INDUSTRY, LIVESTOCK, AND MARKET IN KRIAN, SIDOARJO*.
- Wijaya, M. E., Kacaya Mita, F., Afrianto, E., & Asminar. (2022). Pembangunan Pertanian : Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Pertanian Di Indonesia (Artikel Review) Agricultural Development: The Role Of Government in Agricultural Development (Article Review). *Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Lingkungan*, 2(2).